

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial pada masyarakat. Pada tiga dekade terakhir manajemen pembangunan di Indonesia berlangsung secara sentralisasi atau terpusat, segala bentuk perencanaan dan implementasi atas kebijakan pembangunan didominasi oleh pemerintah pusat. Kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya pada pemerintahan pusat menyebabkan terjadinya banyak kesenjangan pada satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pada dasarnya, sentralisasi pemerintah pusat dalam pembangunan ekonomi hanya berfokus di Pulau Jawa dan daerah-daerah tertentu saja. Namun, pada akhirnya pemerintah pusat memberikan sebuah kebebasan pada pemerintah daerah melalui desentralisasi untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Desentralisasi memiliki pengertian perampangan pemerintah pusat, hal ini menyebabkan berkurangnya konsentrasi kegiatan ekonomi di sekitar daerah ibu kota dan penyebaran kegiatan tersebut di seluruh wilayah nasional (Ascani, 2012).

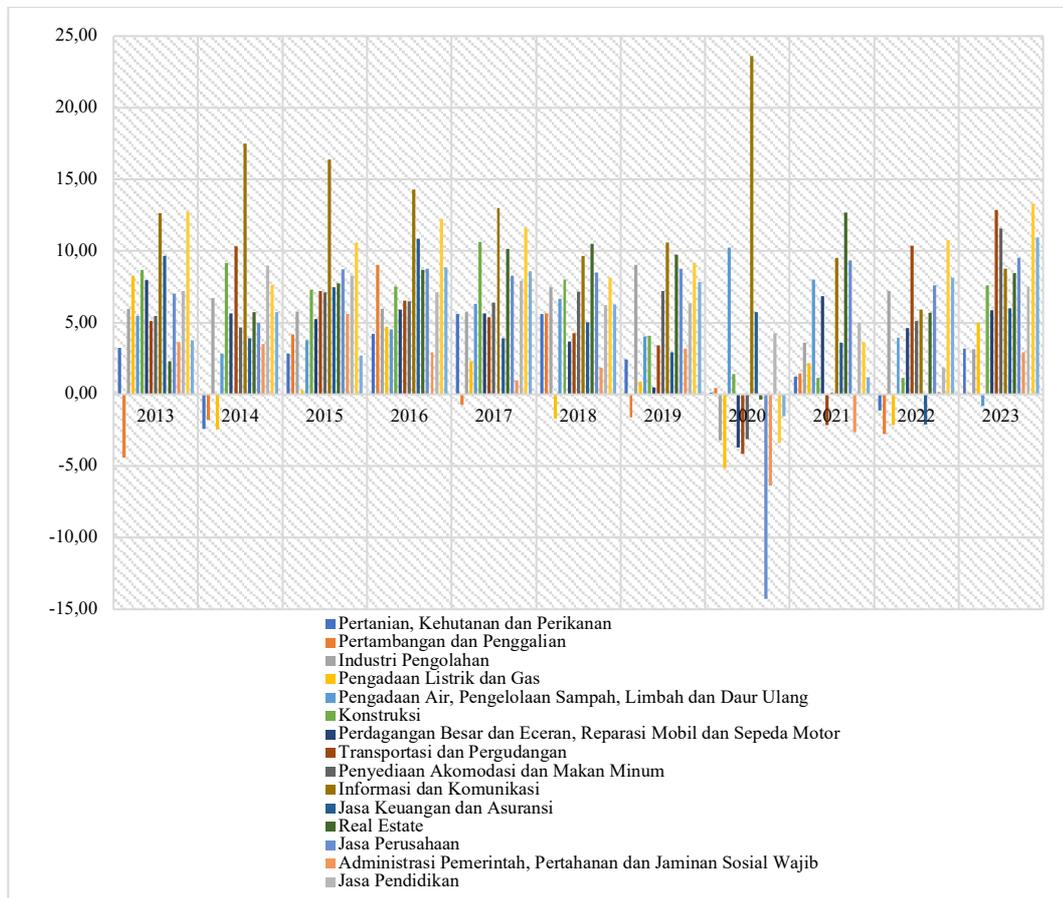
Pada era reformasi lahir sebuah paradigma baru dalam manajemen pembangunan ekonomi di Indonesia, terjadinya pergeseran pola yang semula bersifat sentralisasi atau terpusat menjadi desentralisasi atau perampangan. Salah satu bentuk desentralisasi tersebut ialah dengan adanya otonomi daerah yang

dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya dan segala potensi yang berada di daerahnya. Otonomi daerah merupakan suatu cara untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bagi setiap daerah di Indonesia, di mana setiap daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan perencanaan dalam mewujudkan nilai tambah sumber daya yang dimiliki. Otonomi daerah sendiri telah diatur melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini, otonomi daerah berusaha untuk mencapai kekuasaan yang lebih besar dengan memberikan daerah, terutama Kabupaten dan Kota.

Otonomi daerah sendiri merupakan sebuah cara untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat di setiap daerah Indonesia, dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan diberikannya keleluasaan bagi setiap daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi guna melakukan perbaikan-perbaikan dalam usaha mewujudkan nilai tambah sumber daya sehingga terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin membaik. Upaya-upaya dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan program-program yang dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi tersebut suatu daerah dapat ditinjau secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi (Kuncoro, 2014).

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang sesuai dan akomodatif dengan potensi daerahnya akan turut berpengaruh pada rangkaian aktivitas ekonomi yang saling terintegritas dalam berbagai sektor dan sub sektor ekonomi di Kabupaten Bandung. Struktur perekonomian Kabupaten Bandung berdasarkan sektor-sektor lapangan usaha jika dilihat dari distribusi persentase PDRB, seluruh sektor memiliki potensi yang sama untuk menjadi sektor unggulan apabila dikelola dengan baik. Pada tabel di bawah, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang memiliki peranan terbesar dengan distribusi PDRB berada pada angka 52,53 persen, bahkan lebih dari setengah persen dari jumlah distribusi PDRB setiap sektor perekonomian di Kabupaten Bandung berada pada sektor industri pengolahan pada tahun 2023. Selanjutnya ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada angka 12,94 persen, dan disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 7,04 persen. Kemudian, tidak terpaut jauh dari persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terdapat sektor konstruksi dengan persentase sebesar 6,26 persen pada tahun 2023. Pada Gambar 1.1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2023.

Gambar 1.1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (Data diolah).

Sektor unggulan suatu wilayah berkaitan erat dengan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana dampak yang dihasilkan oleh sektor unggulan dapat dirasakan oleh masyarakat pada daerah atau wilayah tertentu. Sektor unggulan merupakan bidang yang menguasai kelebihan secara komparatif sehingga memberikan andil dalam mempercepat pembangunan wilayah serta pertumbuhan ekonomi, sektor yang memiliki keunggulan yang lebih besar akan mampu berkembang lebih cepat (Tarigan, 2004). Pada dasarnya, pembangunan

ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif begitu pula sebaliknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Dalam menghitung sektor unggulan maka dapat menggunakan beberapa metode analisis seperti *location quotient* (LQ), *shift-share*, dan tipologi klassen.

Dalam upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk memanfaatkan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak untuk sektor yang lainnya. Penerapan konsep model basis pada saat ini sudah mulai berkembang khususnya di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya daerah-daerah yang memusatkan pembangunan ekonomi dengan mengandalkan sektor basis. Penerapan konsep model basis dapat dihitung dengan menggunakan metode *location quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi seberapa besar peran suatu sektor di dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan daerahnya ataupun melaksanakan ekspor pada daerah lainnya. Dengan penerapan model basis ini diharapkan pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang tergolong potensial untuk menjadi sektor basis.

Usaha untuk mewujudkan nilai tambah pada perekonomian di Kabupaten Bandung, maka dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Bandung harus memperhatikan bagaimana pergeseran struktur ekonomi yang

dimiliki setiap sektor perekonomian daerah dengan nasional, untuk menilai seberapa besar peranan setiap sektor terhadap pertumbuhan perekonomian pada kurun waktu tertentu. Pergeseran struktur perekonomian setiap sektor dapat dihitung melalui metode *shift-share* yang membahas mengenai hubungan antara pertumbuhan suatu daerah dan struktur ekonomi suatu daerah. Penggunaan metode *shift-share* digunakan juga untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar misalnya Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Apabila terdapat sektor unggulan ataupun sektor yang potensial digambarkan melalui pergeseran struktur nilai ekonomi yang positif, apabila pergeseran struktur nilai ekonomi pada suatu sektor negatif maka dapat diklasifikasikan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan. Dengan keadaan tersebut, pemerintah harus mendorong kemudahan baik dalam sarana maupun prasarana untuk mendorong pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor dapat berkembang dan memiliki pergeseran struktur ekonomi yang positif.

Selain penerapan model basis dan memberikan perhatian terpusat pada sektor-sektor yang memiliki pergeseran nilai ekonomi positif, setiap daerah harus mengetahui juga bagaimana gambaran, pola, atau struktur perekonomian di daerahnya. Dalam usaha mewujudkan pembangunan ekonomi yang maksimal maka pemerintah daerah dapat membagi atau mengklasifikasikan setiap sektor di daerahnya, untuk memudahkan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya yang akan digunakan untuk mendukung dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Klasifikasi setiap sektor perekonomian dapat diketahui menggunakan

metode tipologi klassen di mana hasilnya akan menggambarkan mengenai pola dan struktur rata-rata pertumbuhan maupun kontribusinya terhadap perekonomian suatu daerah. Tipologi klassen pada dasarnya membagi sektor ekonomi daerah yang diamati menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu: 1) Kuadran I: Sektor maju dan cepat tumbuh; 2) Kuadran II: Sektor maju tapi tertekan; 3) Kuadran III: Sektor yang sedang tumbuh; dan 4) Kuadran IV: Sektor relatif tertinggal. Setelah dilakukannya pemetaan atau klasifikasi terhadap seluruh sektor perekonomian, maka tugas daripada pemerintah daerah Kabupaten Bandung selanjutnya adalah membuat kebijakan yang akan dilakukan guna mendorong pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor.

Setiap daerah di Indonesia begitu pula Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kontribusinya terhadap proses percepatan pembangunan ekonomi sebagai salah satu faktor yang mendukung tingkat keberhasilan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi pada setiap daerah diharapkan mampu untuk mempertahankan kualitas hidup masyarakatnya baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi diperlukan demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan. Terdapat dua pandangan mengenai konsep pembangunan ekonomi, yaitu: 1) Pandangan lama; dan 2) Pandangan baru (Todaro dan Smith, 2011). Pandangan lama mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun kualitas dari pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhatikan. Sedangkan, pada pandangan baru

mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi harus memperhatikan juga kualitasnya.

Pembangunan ekonomi tidak akan tercapai dengan maksimal apabila tidak adanya pembangunan ekonomi yang inklusif pada setiap daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Bandung. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disebut sebagai pertumbuhan yang inklusif, yang sangat ditentukan oleh: 1) Pengurangan kemiskinan; 2) Menyempitnya ketimpangan struktural; 3) Meningkatnya perlindungan sosial; dan 4) Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Thomas 1997). Beberapa permasalahan perencanaan pembangunan sehingga kontra produktif dengan tujuan esensi otonomi dan kurang optimalnya peran dan fungsi pemerintah daerah dalam menangani isu utama suatu daerah. Maka dari itu, peran pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif sangatlah penting dengan cara menggali dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di daerahnya. Pemanfaatan sumber daya yang tepat oleh pemerintah akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan setiap sektor perekonomian menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya, setiap sektor perekonomian memiliki peran untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara inklusif baik dalam aspek seperti ketimpangan (*gini ratio*), tingkat kemiskinan, dan akses pelayanan kesehatan.

Ekonomi inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaannya (Prasetyantoko, 2012). Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan ekonomi bagi semua kelompok masyarakat (*World bank*, 2018). Sederhananya, ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh maka

akan memiliki dampak secara simultan pada penurunan tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan kemudahan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pernyataan ini didasarkan pada tiga orientasi utama dalam pembangunan ekonomi, 1) Terjadinya akselerasi ekonomi; 2) Pengurangan ketimpangan pendapatan; dan 3) Pengurangan kemiskinan absolut (Todaro, 1999). Pembangunan ekonomi inklusif menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) terbagi menjadi tiga pilar yang dapat digunakan untuk mengukur indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu: 1) Pilar I Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi; 2) Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan 3) Perluasan Akses dan Kesempatan. Namun, pada penelitian ini indikator-indikator yang difokuskan pada analisa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah ketimpangan (*Gini Ratio*), tingkat kemiskinan, dan kesehatan (angka harapan hidup).

Namun pada saat ini, kenyataannya banyak sekali daerah-daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bandung sering kali terjebak dalam pembangunan ekonomi yang eksklusif. Pemerintah daerah hanya terpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tanpa melihat dampak yang dihasilkan mengenai tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan, kurang optimalnya peran pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang menyebabkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki pertumbuhan yang tidak optimal sehingga menyebabkan pertumbuhan yang eksklusif. Pembangunan ekonomi eksklusif adalah pembangunan yang hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya eksklusi sosial. Misalnya,

sektor industri dan jasa terus dipacu pertumbuhannya karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat tinggi bagi perekonomian di Kabupaten Bandung, namun sektor industri dan jasa hanya menyerap sedikit jumlah tenaga kerja yang ada. Sedangkan, sektor pertanian yang cukup banyak menyerap tenaga kerja kurang begitu mendapat perhatian dan kemudahan baik dalam sarana maupun prasarana sehingga pertumbuhannya kurang optimal.

Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan produktivitas setiap individu di mana satu individu atau kelompok memiliki produktivitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Setidaknya terdapat empat penyebab utama ketimpangan yang menjadi perhatian pemerintah pada saat ini yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu: 1) Ketimpangan peluang; 2) Ketimpangan pasar kerja; 3) Konsentrasi kekayaan; dan 4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Ketimpangan pendapatan tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan namun juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial (Bahagijo, 2017).

Indeks *gini ratio* merupakan koefisien yang angkanya berkisar dari 0 sampai 1 yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan, semakin mendekati 0 menandakan semakin meratanya distribusi pendapatan sebaliknya apabila semakin mendekati 1 maka distribusi pendapatan semakin timpang. Pada tiga tahun terakhir persentase ketimpangan (*gini ratio*) di Kabupaten Bandung berada pada angka 0,368 persen, sedangkan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar

0,360 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan tidak mencapai target minimal nasional, maka dari itu perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan (*gini ratio*) di Kabupaten Bandung.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat pada suatu daerah tertentu. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan sangat rendah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat ini sedang berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan yang relatif tinggi pada daerah-daerah di Indonesia, dengan mengimplementasikan berbagai program dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan misalnya pemberian subsidi listrik dan bahan bakar minyak.

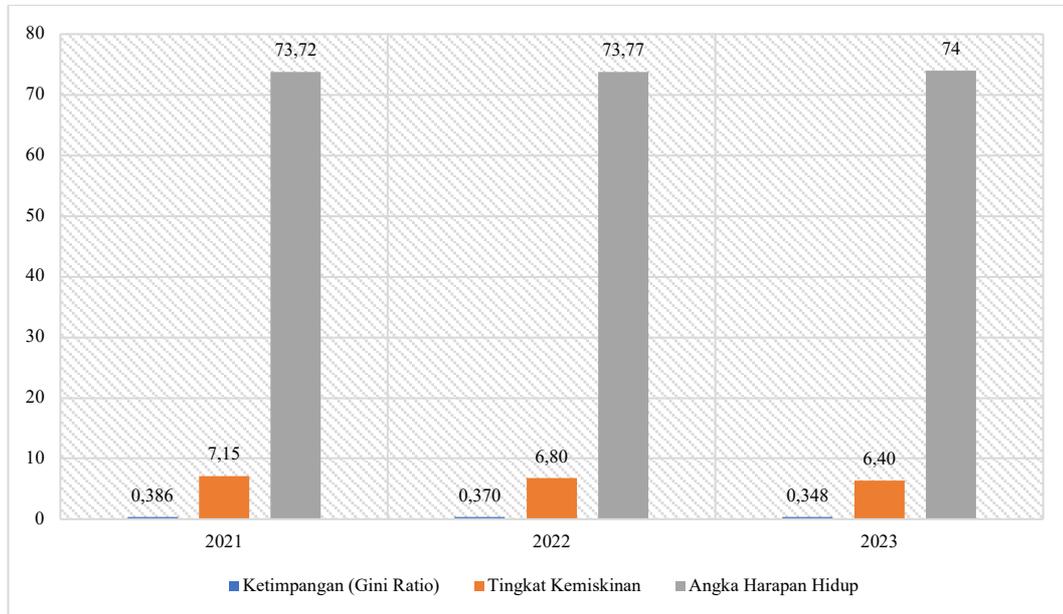
Pada dasarnya, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi akan berdampak terhadap kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup sehingga standar hidup dalam bidang pendidikan ataupun kesehatan pada masyarakat miskin akan sangat rendah dan rentan. Dalam tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung berada pada angka 6,78 persen, kemudian tingkat konsumsi protein per kapita per hari masyarakat Kabupaten Bandung dengan penghasilan 40 persen terbawah hanya mengonsumsi 48,96 gram. Berdasarkan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditetapkan bahwa tingkat kemiskinan setiap daerah berada pada angka 6,5-7,5 persen dan standar nasional dalam kecukupan konsumsi

protein per kapita per hari sebesar 57 gram. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung relatif aman meskipun angka tersebut belum berada di bawah target nasional sedangkan untuk konsumsi protein per kapita perhari belum mencukupi target nasional yang telah ditetapkan.

Kesehatan merupakan salah satu komponen dalam sistem kesehatan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, kesehatan merupakan salah satu faktor krusial dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran atau indikator dalam menghitung tingkat kesehatan pada suatu negara maupun daerah dapat dilihat melalui angka kematian dan angka harapan hidup. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan pada masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) yang tinggi menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berada pada angka 74,00 persen, angka tersebut lebih tinggi jika di bandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada angka 73,97 persen. Berdasarkan data tersebut maka Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bandung melebihi target nasional, meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten lebih hanya tinggi 0,07 persen jika dibandingkan nasional. Hal tersebut masih diperlukan peningkatan yang harus didukung oleh inovasi-inovasi layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan dari beberapa indikator-indikator pertumbuhan ekonomi inklusif kurang memperlihatkan hasil yang baik sehingga pembangunan ekonomi inklusif masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Belum optimalnya pembangunan inklusif yang baik dapat diindikasikan oleh belum tercapainya target minimal nasional serta belum optimalnya dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan setiap sektor perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. Meskipun target nasional belum tercapai dengan baik ketimpangan distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin, dan angka harapan hidup memiliki *trend* positif pada setiap tahunnya. Misalnya, ketimpangan distribusi pendapatan yang digambarkan melalui (*gini ratio*) pada setiap tahunnya mendekati angka 0 yang berarti ketimpangan di Kabupaten Bandung menandakan mulai adanya pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian, tingkat kemiskinan di mana setiap tahunnya mengalami penurunan sekitar 0,20 persen hingga 0,30 persen serta angka harapan hidup mengalami pertumbuhan tiga tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2. *Gini Ratio*, Persentase Penduduk Miskin, dan Angka Harapan Hidup (Persen) di Kabupaten Bandung pada Tiga Tahun Terakhir.

Gambar 1.2. Gini Ratio, Persentase Penduduk Miskin, dan Angka Harapan Hidup (Persen) di Kabupaten Bandung pada Tiga Tahun Terakhir



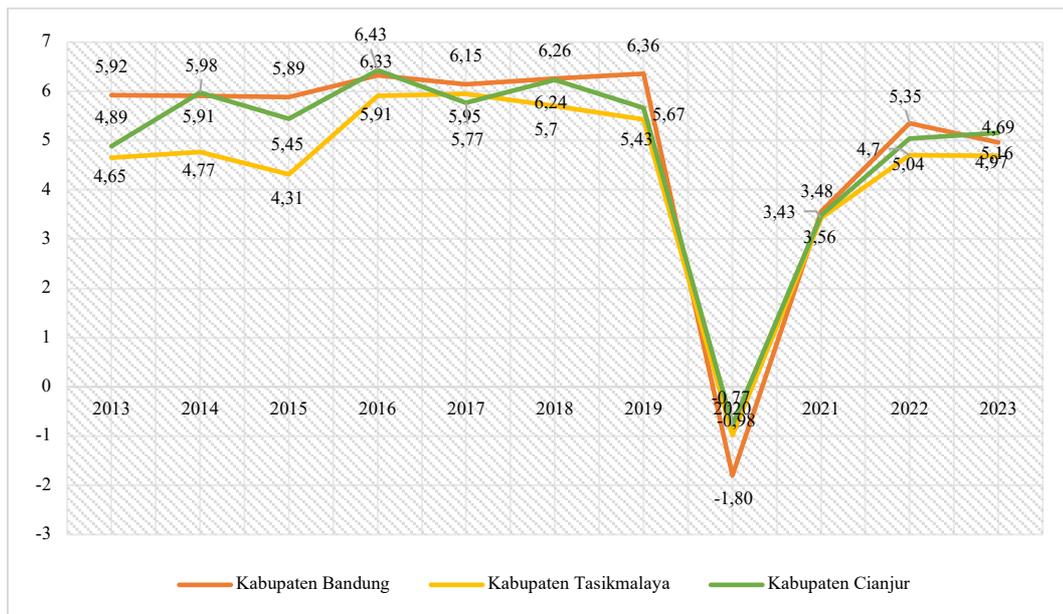
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data diolah).

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif pada suatu wilayah. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengatur wewenang, mengelola sumber daya, dan melaksanakan program-program pembangunan suatu daerah. Salah satu tujuan utama dari adanya pembangunan ekonomi adalah untuk mendorong kontribusi setiap sektor untuk memacu pembangunan ekonomi pada aspek yang lainnya misalnya ketimpangan, tingkat kemiskinan, akses atau kemudahan dalam kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Pembangunan ekonomi yang berhasil dan sukses dilakukan oleh pemerintah akan memiliki dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat, keberhasilan dan kesuksesan dapat ditinjau melalui

tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, laju pertumbuhan ekonomi dapat menentukan bagaimana kemampuan dari suatu sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi akan memberikan peluang untuk investasi yang baik, sementara pertumbuhan yang rendah dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 hingga 2019 memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur. Meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mengalami penurunan dan bahkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan penjualan, penurunan jumlah produksi, dan penurunan jumlah pendapatan sehingga roda perekonomian mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat pandemi. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan pertumbuhannya berada di bawah Kabupaten Cianjur namun lebih tinggi dari Kabupaten Tasikmalaya. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur tahun 2013-2023.

Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (Data diolah).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi yang inklusif adalah untuk menciptakan peningkatan distribusi pendapatan masyarakat dan daerah yang meningkat, mengurangi angka kemiskinan, kemudahan dalam mengakses saran dan prasarana, dan diversifikasi kegiatan ekonomi yang akan tercapai. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung, isu-isu strategis yang akan dilaksanakan yang berhubungan dengan penelitian ini di antaranya adalah 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat; 3) Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana; dan 4) Peningkatan daya saing sektor unggulan. Sehingga, fokus penelitian ini adalah bagaimana sektor unggulan dapat memacu

pembangunan ekonomi yang baik sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai upaya untuk mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan serta pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, peneliti membuat penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dan peran sektor unggulan yang tidak maksimal sehingga dampak yang dihasilkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bandung tidak maksimal.
2. Pembangunan ekonomi yang masih eksklusif di Kabupaten Bandung berdasarkan ketimpangan pendapatan (*gini ratio*), jumlah penduduk miskin, dan angka harapan hidup.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” adalah sebagai berikut:

1. Sektor manakah yang menjadi sektor unggulan berdasarkan penggabungan metode atau *overlay* berdasarkan metode *location quotient* metode *shift-share*, dan metode tipologi klassen di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh sektor unggulan terhadap ekonomi inklusif di Kabupaten Bandung jika dilihat dari melalui tingkat ketimpangan (*Gini Ratio*), tingkat kemiskinan, dan kesehatan (angka harapan hidup)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas maka penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor manakah yang menjadi sektor unggulan berdasarkan penggabungan dari metode analisis *location quotient* (LQ), metode analisis *shift-share*, dan metode analisis tipologi klassen di Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor unggulan di Kabupaten Bandung terhadap ketimpangan pendapatan (*gini ratio*), tingkat kemiskinan, dan kesehatan (angka harapan hidup) di Kabupaten Bandung.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka dapat digambarkan mengenai bagaimana ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” sebagai berikut:

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” tidak terlalu luas maka peneliti melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penggunaan data-data pada penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2013-2023 mengenai produk domestik regional bruto, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan kesehatan (angka harapan hidup).

1.5.2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah melakukan analisa potensi regional setiap sektor perekonomian yang kemudian diklasifikasikan menjadi sektor unggulan berdasarkan metode analisis *location quotient* (LQ), analisis *shift-share*, dan analisis tipologi klassen. Kemudian, pada penelitian ini dilaksanakan juga analisa pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bandung. Di mana variabel yang digunakan pada ekonomi inklusif pada penelitian ini yaitu ketimpangan pendapatan (*gini ratio*), tingkat kemiskinan, dan kesehatan (angka harapan hidup) yang ditinjau perkembangannya dari tahun 2013-2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2023” memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan menjadi bahan tambahan materi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi inklusif pada suatu wilayah beserta dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait, mengenai kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan guna meningkatkan peran sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan referensi serta dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.